

ABSTRAKSI

Skripsi ini akan mengambil fokus pembahasan kepada Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke VII di Surabaya, mengambil batas temporal tahun 1969. Hal ini lebih mengerucutkan pada penyelenggaraan acara olahraga kelas nasional yang diadakan pertama kali saat Orde Baru.

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode sejarah yang terdiri dari pengumpulan data (*heuristik*), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data-data yang banyak digunakan adalah arsip mengenai Pekan Olahraga Nasional yang diperoleh dari Badan Arsip Kota Surabaya. Sumber Koran *Sketsmasa*, *Liberty*, dan *Tjaraka* dari Perpustakaan Medayu Agung Surabaya. Sumber buku-buku penunjang didapat dari Perpustakaan koleksi khusus Universitas Airlangga Surabaya.

Penelitian ini membahas mengenai penyelenggaraan PON ke VII di Surabaya yang erat kaitannya dengan militerisasi. Dikatakan demikian karena panitia yang berkecimbung didalamnya adalah mayoritas anggota militer, dengan Mayjen TNI (Purn.) Acub Zainal sebagai Ketua Eksekutif I. Dengan motto mengusung semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia acara ini berlangsung sangat sukses, sebagai tolak ukur acara olahraga termegah pertama saat Orde Baru. Hal ini tidak serta merta berjalan mulus, dikarenakan Pemerintah enggan untuk membiayai acara ini. Akhirnya, demi terlaksananya acara ini maka Panitia setuju untuk melegalkan Lotto (Lotere Totalisator) guna untuk membiayai dana penyelenggaraan yang ditaksir mencapai angka Rp. 900 juta . Selain itu, juga adanya penarikan pajak karcis hingga pajak sembako untuk membiayai segala kebutuhan yang diperlukan, guna melancarkan kegiatan ini. Dari gambaran tersebut, menunjukkan adanya interaksi sosial antara olahraga dan politik.

Kata Kunci: Politik, Olahraga, Surabaya